

**HAMBATAN TURKI DALAM NORMALISASI HUBUNGAN DENGAN
ISRAEL PASCA TRAGEDI MAVI MARMARA (TAHUN 2011 - 2016)**

Nurbaiti Kurniasari

Jurusan Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

nurbaiti.ks@gmail.com

Abstract

This study describes the normalization of relations between Turkey and Israel after the two countries got stuck in conflict post Mavi Marmara 2010. The efforts of normalization conduct by the two countries during 2011 to 2016. As known the relations between Turkey and Israel deteriorated after the killing of nine Turkish nationals in the bloody attack on the Mavi Marmara in May 31, 2010. This tragedy had made Turkey major upset and downgrade diplomatic relations to second secretary. Turkey reiterated three conditions for normalization of relations, including an apology, the payment of compensation to the families of the victims and the lifting of Israel's naval blockade on Gaza. Although a number of reconciliation is done, but until now normalization to commit diplomatic exchange has not yet been reached. This research attempts to show and explain that on the Turkish side, there are several factors that influence the decision making proces of Turkey foreign policy that led the slow normalization of relations between Turkey and Israel. They are internal factors, such domestic politic, economy and military capabilities, and international context as external factor.

Keywords: *Mavi Marmara, Normalization, Decision making process, Foreign policy, Domestic politic.*

Abstrak

Penelitian ini memaparkan normalisasi hubungan Turki dan Israel setelah kedua negara terjebak dalam situasi konflik pasca Mavi Marmara 2010. Upaya normalisasi dilakukan oleh kedua negara selama tahun 2011 hingga 2016. Sebagaimana diketahui hubungan kedua negara memburuk pasca terbunuhnya sembilan warga negara Turki dalam tragedi berdarah Mavi Marmara pada 31 Mei 2010 silam. Peristiwa tersebut membuat Turki marah dan menurunkan status hubungan diplomatik menjadi sekretaris kedua. Turki mengajukan tiga tuntutan kepada Israel sebagai syarat normalisasi hubungan, diantaranya permohonan maaf, pembayaran ganti rugi kepada keluarga korban dan pencabutan blockade. Meskipun sejumlah rekonsiliasi dilakukan, namun hingga kini normalisasi hingga betul-betul melakukan pertukaran diplomatik belum kunjung tercapai. Penelitian

ini mencoba menunjukkan bahwa di sisi Turki terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan politik luar negeri Turki sehingga proses normalisasi hubungan antara Turki dan Israel berjalan lambat, yaitu faktor internal seperti politik domestik, kondisi ekonomi dan militer serta faktor eksternal mencakup kedudukan negara dalam konteks internasional.

Kata Kunci: *Mavi Marmara, Normalisasi, Proses pembuatan kebijakan, Politik luar negeri, Politik dalam negeri.*

PENDAHULUAN

Hubungan bilateral antara Turki dan Israel dalam lima tahun terakhir belum kunjung membaik. Setelah lebih kurang enam puluh satu tahun Turki dan Israel menjalin hubungan diplomatik, kini hubungan dua negara yang pernah menjadi sekutu terdekat di Timur Tengah itu terjebak dalam situasi konflik. Konflik yang tak terhindarkan meletup setelah Israel mengirim pasukan militer untuk menyerang kapal kemanusiaan asal Turki, Mavi Marmara, pada 31 Mei 2010.

Mavi Marmara merupakan kapal milik NGO Turki bernama *İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı* (IHH) yang tengah membawa bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza, Palestina dalam misi *The Gaza Freedom Flotilla*. Akibat serangan bersenjata Israel sedikitnya sembilan warga negara Turki yang turut menjadi relawan kemanusiaan tewas. Merespon tindakan tersebut, Turki segera menarik Duta Besarnya di Tel Aviv dan mengusir Duta Besar Israel untuk Turki di Ankara. Lebih jauh, Turki mengambil langkah untuk menurunkan status hubungan diplomatik dari yang semula Kedutaan Besar menjadi Sekretaris Kedua (Utami, 2012).

Tidak berhenti sampai di situ, Turki juga menghentikan kerjasama di bidang militer, diantaranya pelatihan militer gabungan yang dalam kerangka kerja *Military Training Cooperation Agreement* (MTCA) telah menjadi agenda tahunan sejak 1998; pembekuan proyek *Defense Industry Cooperation Agreement* (DICA) sebagai misal *upgrading* pesawat F4 *Phantom* yang menelan biaya \$650 juta Dollar AS serta pengembangan pesawat tanpa awak Heron yang dijalankan di bawah pengawasan *Israel Aerospace Industries* (Handayani, 2012; Sasley, 1998).

Demikian pula dengan pertukaran informasi intelijen antara kedua negara sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian strategis paling komprehensif ini pun dihentikan (Stern & Ross, 2013).

Langkah yang diambil Turki sebagai respon atas tragedi Mavi Marmara ini membuat hubungan dengan Israel semakin renggang. Sejak membuka hubungan diplomatik secara resmi pada Maret 1950, ini merupakan kali pertama hubungan keduanya berada pada level paling buruk sepanjang sejarah (Kalin, 2013). Turki mengajukan tiga tuntutan kepada Israel sebagai syarat normalisasi hubungan, diantaranya permohonan maaf, pembayaran ganti rugi kepada keluarga korban dan pencabutan blokade. Maret 2013, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya melayangkan permohonan maaf kepada Turki atas terbunuhnya sembilan warga sipil dalam serangan di atas Mavi Marmara.

Serentetan rekonsiliasi pun dilakukan untuk membicarakan perbaikan hubungan. Akan tetapi, meskipun serentetan rekonsiliasi telah dilakukan selama tahun 2011 hingga 2016, belum nampak adanya deklarasi 'damai' dari kedua negara yang bersangkutan. Terutama dari sisi Turki sebagai negara yang menderita kehilangan nyawa, tidak kunjung menunjukkan isyarat untuk segera mengakhiri konflik dengan Israel. Padahal memperbaiki hubungan dengan Israel menjadi langkah tepat untuk memperkuat pertahanan kawasan mengingat perang terus berkecamuk di sejumlah negara tetangga yang berpotensi merentankan keamanan Turki.

Selain itu, mengingat Turki merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, pendekatan hubungan dengan Israel dapat melanjutkan peran yang biasa dilakoninya sebagai mediator konflik antara negara-negara Timur Tengah dengan Israel melalui diplomasi kedua negara yang berdamai (Dzakirin, 2012). Dengan melihat permasalahan di atas memunculkan pertanyaan besar mengenai penyebab lambatnya normalisasi hubungan yang dicapai Turki – Israel selama tahun 2011 hingga 2016.

PEMBAHASAN

Dengan menganalisa perilaku yang ditunjukkan oleh negara, dalam hal ini Turki sebagai subjek penelitian, lambatnya normalisasi hubungan Turki dan Israel dipengaruhi oleh faktor internal berupa situasi politik domestik, kondisi ekonomi

dan militer, dan faktor eksternal yang mencakup kedudukan negara dalam konteks internasional.

1. Faktor Internal

1.1. Situasi Politik Domestik

A. Partai Politik

Dalam lima tahun terakhir, parlemen Turki dikuasai oleh tiga partai politik yang menduduki kursi parlemen, diantaranya AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*), CHP (*Cumhuriyet Halk Partisi*), dan MHP (*Milliyetçi Hareket Partisi*). Pertanyaan partai mana yang paling mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah dapat dilihat dari perolehan suara yang didapat partai-partai tersebut. Sejak pemilu legislatif tahun 2002 hingga kini, *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) selalu menang telak dari partai oposisi, dengan perolehan suara hampir mencapai tiga perempat dari total 550 kursi agar dapat digunakan untuk melancarkan agenda yang diusung AKP tanpa kendala.

Tabel 1. Perolehan Pemilihan Umum Turki Periode 2002 hingga 2015

PARTAI	2002		2007		2011		2015	
	SUARA	KURSI	SUARA	KURSI	SUARA	KURSI	SUARA	KURSI
AKP	34.28%	363	46.66%	341	49.83%	327	49.47%	317
CHP	19.4%	178	20.85%	112	25.98%	135	25.3%	134
MHP	-	-	14.29%	71	13.01%	53	11.9%	40
HDP	-	-	-	-	-	-	10.75%	59
Lain-lain	-	0	-	0	-	0	-	0
Independen	0.99%	9	1.63%	26	6.57%	35	-	-
Jumlah	31.398.452 100%	550	35.017.315 100%	550	42.941.763 100%	550	46.747.855 100%	550

Menurut Berelovich (2014) melalui dominasi AKP tersebut kemampuan parlemen untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sangat kecil. Sebaliknya kemungkinan mendorong agenda pemerintah sangat besar karena sejumlah besar Dewan Kabinet yang dibentuk parlemen berasal dari partai yang sama (Berelovich, 2014). Hal yang sama pun berlaku dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri Turki terhadap Israel.

Pemerintah AKP Turki seperti mengkaji urgensi normalisasi kembali dengan belajar dari sejarah masa lalu ketika Turki masih menjalin hubungan baik dengan Israel. Oleh karena sebelumnya Turki beberapa kali dibuat

kecewa atas kebijakan yang diambil Israel. *Pertama*, persepsi buruk tentang Israel muncul sejak Turki kecewa atas sikap Israel yang melancarkan operasi *Cast Lead* ke Palestina pada 2009 silam. Tindakan ini dinilai tidak menghargai usaha Turki yang tengah menjadi mediator konflik Israel – Suriah dan Israel – Palestina. Padahal, sebagaimana dikatakan Kushner (2010) bahwa menjadi mediator konflik merupakan senjata AKP untuk meningkatkan citra Turki di mata internasional.

Kedua, karena Israel telah kehilangan pengaruhnya di mata Amerika Serikat. Israel dinilai tidak lagi bisa diharapkan untuk membantu Turki menghapus tuduhan ‘Genosida Armenia’ oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa (Kushner, 2010). Di atas daripada itu, selama Turki berada di bawah pemerintahan AKP, hubungan dengan Israel selalu mengalami pasang surut yang tidak stabil. Protes terbuka banyak dilontarkan oleh pejabat AKP untuk mengecam serangan Israel ke wilayah Muslim di Palestina dan Lebanon pada kurun waktu 2002 hingga sebelum Mavi Marmara.

Pasca tragedi Mavi Marmara kecaman bertubi-tubi tidak hanya datang dari pejabat AKP namun juga dari partai oposisi. Pemimpin MHP, Devlet Bahçeli, menyebut serangan Israel terhadap Mavi Marmara hingga menimbulkan korban jiwa sama saja seperti menyerang bangsa Turki secara terang-terangan (Kosebalaban, 2010). Di sisi lain, CHP selaku oposisi utama AKP ini mendesak pemerintah untuk segera normalisasi hubungan dengan Israel. Akan tetapi Ahmet Davutoglu mewakili AKP kembali menegaskan,

Satu: Kita tidak bisa berteman dengan tiran. Dua: Kita tidak bisa berteman dengan mereka yang *coup d'Etats*. Tiga: Kita tidak bisa berteman dengan orang-orang yang menginjak-injak martabat manusia. Satu: Kami adalah teman yang tertindas. Dua: Kami adalah pembela kebebasan. Tiga: Kami selalu mengatakan keadilan. (Bulut, 2016)

Selain itu, AKP Turki juga menunjukkan dukungannya terhadap kelompok Hamas yang merupakan musuh utama Israel di wilayah Palestina. Padahal sebelumnya menurut Cagaptay (2010) Turki tidak memiliki catatan yang menunjukkan ketertarikannya mendukung kelompok dengan agenda Islamis, terlebih yang berpotensi merenggangkan hubungan dengan Israel (Cagaptay, 2010). Di tahun 2010, setelah Israel menolak meminta maaf atas

hilangnya sembilan warga negara Turki dalam tragedi Mavi Marmara, hubungan Turki dengan Hamas semakin dekat.

Meskipun pada Desember 2015, Israel menyampaikan keberatan atas keberadaan petinggi Hamas di Turki dan meminta Turki mengurangi kegiatan Hamas di Turki, hingga kini tidak ada aturan khusus yang dikeluarkan Turki dalam rangka membatasi pergerakan Hamas di wilayah Turki. Keputusan AKP Turki untuk tidak memutus hubungan dengan Hamas menjadi salah satu penyebab tersendatnya proses normalisasi.

B. Birokrat

Pengambilan kebijakan politik luar negeri Turki tidak terlepas dari sosok seorang Perdana Menteri, Recep Tayyeb Erdogan. Selama periode pemerintahannya, Erdogan telah membawa Turki memainkan peran penting di kawasan sebagai mediator konflik Arab-Israel dan Barat-Timur yang membuat Reputasi Turki di mata Dunia Islam meningkat (Sekulow, 2015). Erdogan juga dikenal sebagai tokoh yang paling berani mengkritik operasi militer Israel ke Palestina. Sejak sebelum AKP naik kuasa, Erdogan sudah berani menolak hegemoni Israel di tanah Palestina (Sekulow, 2015). Julukan Israel sebagai 'negara teroris' yang 'paling mengetahui cara membunuh' dilontarkan Erdogan kepada Israel selama perang di Palestina tahun 2004, 2008, 2009.

Perdana Menteri Erdogan menyebut serangan Israel terhadap aktivis kemanusiaan Mavi Marmara sebagai 'pembantaian berdarah'. Bahkan selama lima tahun terakhir ini Erdogan tidak berhenti mengancam serangan Israel ke Palestina tahun 2012 dan 2014. Erdogan menyebut serangan Israel yang tidak pandang bulu dalam membunuh warga Palestina sipil atau militer, anak-anak atau orangtua telah melampaui "kekejaman barbarisme Hitler". Ini yang kemudian membuat proses rekonsiliasi antara kedua negara berlangsung semakin alot.

Erdogan juga menyebut tindakan Israel telah menjadi ancaman utama bagi keamanan wilayah Turki. Oleh karena itu, setelah insiden Mavi Marmara, Dewan Keamanan Nasional Turki mengamandemen sebuah 'dokumen rahasia' yang berisi kebijakan

Ankara pusat dan menambahkan Israel sebagai ‘ancaman utama’ bagi Turki –menggantikan Iran dan Suriah– yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan kawasan (Haaretz, 2010). Atas saran dari Erdogan pula, Turki memperketat keamanan dengan meningkatkan patroli angkatan laut Turki di kawasan Mediterania Timur (WikiLeaks, 2011).

Lambatnya normalisasi antara Turki dan Israel juga dikarenakan tuduhan anti-Semit yang dilayangkan kepada Erdogan. Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman, menyebut kecaman Erdogan di hadapan parlemen atau masyarakat luas guna menentang operasi militer Israel ke Palestina mengandung pernyataan yang menjurus kepada anti-Semit untuk menyebarkan kebencian diantara masyarakat Turki dalam memandang Yahudi Israel (Reuters, 2015). Oposisi di parlemen, Aykan Erdemir dari CHP membenarkan bahwa pidato-pidato Erdogan selama ini mendorong masyarakat Turki semakin membenci Yahudi (The Media Line, 2015).

Sikap Turki dalam menghadapi serangkaian rekonsiliasi dengan Israel oleh Semih Idiz (2015) dinilai bertumpu pada pemikiran garis keras Erdogan yang Islam berbasis sikap moralistik dan ideologis (Idiz, 2015). Tidak dapat ditampik bahwa di bawah Erdogan, solidaritas Muslim Turki semakin meningkat. Yang ditunjukkan melalui ketegasan Erdogan dalam membela Palestina dan Hamas. Bertolak belakang dengan apa yang dituduhkan Israel kepada Hamas, Erdogan justru mengatakan Hamas bukanlah organisasi teroris (Lazaroff, 2011).

Erdogan juga memiliki peran besar dalam menaikkan isu Palestina sebagai isu publik di Turki. Seperti pada 2011, Erdogan menekankan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina “bukanlah pilihan tetapi kewajiban” (Al Jazeera, 2011b). Proses negosiasi selalu tersendat jika terkait dengan perang di Palestina. Perang Palestina tahun 2014 menghentikan rekonsiliasi yang telah berlangsung sejak 2012. Sekalipun tindakan ini menuai protes dari kelompok oposisi, Erdogan bersikeras akan memperjuangkan ketiga tuntutan hingga tercapai pencabutan blokade. Erdogan menyebut “Turki tidak akan berjaga-jaga bagi negara-negara yang kejam.” (Dombey, 2014)

C. Opini Publik

Konflik Palestina – Israel memiliki porsi yang cukup menyorot perhatian publik Turki. Sensitifitas masyarakat Turki terhadap isu Palestina cukup tinggi, terutama kaum konservatif-nya menaruh simpati kuat terhadap penderitaan Palestina (Sekulow, 2015). Menurut Umut Uzer ada kesamaan sejarah yang dirasakan masyarakat Turki yang mayoritas Muslim untuk menolak kekejaman Israel terhadap Muslim di Palestina (Uzer, 2013). Sejarah akan ‘kesamaan nasib’ itulah kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat Turki dalam merespon tindakan Israel terhadap Palestina.

Meskipun demikian, Cagaptay (2010) mengakui bahwa sebelum AKP berkuasa dukungan masyarakat Turki terhadap Palestina belum ekstrem seperti sekarang ini. Menurutnya, massa yang tergerak memprotes Israel hanya ribuan orang sementara kini isu Palestina memobilisasi ratusan ribu masyarakat Turki untuk turun ke jalan menyuarakan dukungan mereka terhadap Hamas dan anti-Israel (Cagaptay, 2010). Terlebih sejak tragedi Mavi Marmara, gelombang massa terlihat di beberapa titik di kota-kota besar Turki. Tidak berhenti sampai di situ, sepanjang tahun 2012 hingga Juli 2014 serangkaian unjuk rasa terjadi di Turki memprotes operasi militer Israel ke Palestina. Pada 30 Mei 2015, kerumunan massa memadati pusat kota Istanbul untuk melakukan upacara peringatan lima tahun tragedi Mavi Marmara.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kushner (2010) bahwa reaksi publik Turki terhadap operasi militer Israel di Palestina yang diekspresikan melalui unjuk rasa merupakan faktor penting dalam menentukan sikap dan tindakan pemerintah. Besarnya dukungan yang ditunjukkan masyarakat Turki terhadap kemerdekaan Palestina, mendorong pemerintah untuk tetap memperjuangkan terpenuhinya tiga tuntutan normalisasi. Terutama tuntutan agar Israel meninggalkan blokade Jalur Gaza.

Di satu sisi, naiknya isu Palestina di tengah masyarakat Turki saat ini sering dikaitkan sebagai hasil jerih payah AKP dalam menghegemoni media massa. Merujuk pada laporan Murat Akser dan Banu Baybars Hawks (2012) mengungkapkan bahwa media massa di Turki

saat ini dikuasai oleh AKP (Akser & Hawks, 2012). Beberapa media massa yang diduga mendukung AKP, yaitu *Yeni Akit*, *Millî Gazete*. Sejak 2007, editorial Sabat-ATV telah menggeser dukungannya dari yang semula *Kiri-Tengah* menjadi pro-pemerintah (Corke, finkel, Kramer, Robbins, & Schenkkan, 2014, hal. 7). Media ini mendukung pemerintah AKP untuk membangkitkan solidaritas Muslim supaya lebih peduli terhadap Palestina.

Dari hasil survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga sebagaimana dilansir dari berbagai sumber memperlihatkan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2014 terjadi pergeseran persepsi publik Turki dalam memandang Israel. Menurut survey pada April 2010, 77% masyarakat Turki memandang Israel membawa pengaruh buruk, tahun 2013 naik menjadi 81% dan menyisakan 8% berpendapat positif tentang Israel, pada 2014 jumlah publik Turki yang menganggap Israel sebagai ancaman utama bagi Turki meningkat kembali menjadi 86% dan hanya 2% yang berpandangan positif terhadap Israel, sementara tahun 2015 sekitar 88% publik Turki menganggap berteman dengan Israel tidak menguntungkan dan menganggap Israel merupakan negara paling berbahaya bagi Turki (GMF, 2015, hal. 5; Ho, 2014; World Public Opinion, 2010, hal. 15).

Meskipun perubahan yang terjadi antara tahun 2010 hingga 2014 tidak begitu signifikan, angka tersebut ialah yang paling tinggi dibandingkan tahun 2004 yang hanya 32%. Dengan demikian, opini publik melalui serentetan aksi demonstrasi masyarakat Turki menjadi sumber dukungan bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang konfrontatif terhadap Israel.

1.2. Kondisi Ekonomi

Pengambilan kebijakan luar negeri Turki dipengaruhi oleh kondisi Ekonomi. Menurut *The Economist* (2016), dalam lima tahun terakhir hingga 2016 awal Turki dapat mempertahankan stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan 4% (*The Economist*, 2016). Sektor yang paling banyak menopang GDP Turki ialah industri manufaktur, seperti industri tekstil,

otomotif dan konstruksi yang menyumbang sekitar 24.2% dari total GDP atau setara dengan 220 miliar USD (ISPAT, 2014). Industri tekstil Turki sejak 2011 menempati urutan ke-7 untuk kategori negara eksporter terbesar dan ke-8 untuk kategori industri tekstil dunia.

Sektor pariwisata Turki merupakan sumber pendapatan kedua terbesar yang menyumbang sedikitnya 11% dari total GDP Turki atau sekitar 170 miliar USD (RT, 2016). Sekalipun tragedi Mavi Marmara telah mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan Israel yang berkunjung ke Turki dari yang semula 109.559 pada tahun 2010 menjadi 31.652 pada tahun 2012, angka tersebut tidak berdampak signifikan bagi pariwisata Turki. Turki justru kebanjiran wisatawan dari negara-negara Eropa. Bahkan wisatawan dari negara-negara jazirah Arab naik 12%. Pada tahun 2013, Turki tercatat menjadi negara ke-enam dunia yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.

Meskipun demikian, Turki tidak menghentikan hubungan perdagangan komersil dengan Israel. Pada tahun 2011 setelah Turki memutuskan hubungan diplomatik, hubungan perdagangan ekspor dan impor tidak sepenuhnya dihentikan. Volume perdagangan bilateral Turki – Israel sejak 2010 hingga 2016 mengalami fluktuatif. Akan tetapi dengan tidak diputusnya hubungan perdagangan komersil bukan berarti Turki masih sangat bergantung terhadap Israel. Jika dilihat dari total transaksi yang dilakukan kedua negara, Israel bukanlah mitra dagang paling penting bagi Turki. Perdagangan Turki dengan Israel tidak dapat dibandingkan dengan volume perdagangan antara Turki dengan negara-negara Eropa yang selama ini menjadi wilayah tujuan utama produk Turki.

Tabel 2. Sepuluh besar teratas negara mitra dagang Turki 2014

Nurbaiti Kurniasari

Hambatan Turki dalam Normalisasi Hubungan dengan Israel Pasca Tragedi
Mavi Marmara (2011 - 2016)

Top 10 Export Partners	Export Volume (\$)	Top 10 Import Partners	Import Volume (\$)
Germany	\$15,155,933,772	Russia	\$25,293,391,962
Iraq	\$10,896,202,645	China	\$24,918,237,813
United Kingdom	\$9,914,028,188	Germany	\$22,369,253,291
Italy	\$7,144,642,175	United States	\$12,727,879,163
France	\$6,470,327,200	Italy	\$12,055,915,726
United States	\$6,345,416,230	Iran	\$9,833,329,096
Russia	\$5,945,712,565	France	\$8,122,565,150
Spain	\$4,763,139,962	Korea, South	\$7,548,310,671
United Arab Emirates	\$4,662,880,768	India	\$6,898,553,730
Iran	\$3,888,292,120	Spain	\$6,075,844,195

Sumber: (Michigan State University, 2014)

Bagi Turki, Israel bukan mitra dagang paling utama karena bahkan tidak masuk dalam sepuluh besar terbaik. Sedangkan bagi Israel, Turki merupakan mitra dagang penting di kawasan. Turki masuk dalam sepuluh besar negara pengimpor dan negara pengekspor produk Israel. Pada 2011 lalu, Gubernur Bank Israel, Stanley Fischer mengatakan,

Konsekuensi dari tidak memiliki hubungan perdagangan dengan Turki akan berpotensi ekspansif ... Yang mana merupakan (negara tujuan) ekspor paling berhasil- dimana (Turki) adalah yang sangat penting. (Champion & Mitnick, 2011)

Oleh karena itu, dengan melakukan hubungan dagang maupun tidak dengan Israel, tidak berpengaruh signifikan bagi perekonomian Turki.

Tabel 3. Sepuluh besar teratas negara mitra dagang Israel 2014

Top 10 Export Partners	Export Volume (\$)	Top 10 Import Partners	Import Volume (\$)
United States	\$18,573,786,000	United States	\$8,564,065,000
Hong Kong	\$6,129,016,000	China	\$5,994,138,000
United Kingdom	\$3,973,619,000	Switzerland	\$5,189,867,000
Belgium	\$3,299,311,000	Germany	\$4,651,256,000
China	\$2,792,891,000	Belgium	\$3,818,141,000
Turkey	\$2,755,601,000	Italy	\$2,784,087,000
Netherlands	\$2,484,702,000	Turkey	\$2,683,570,000
India	\$2,202,593,000	Netherlands	\$2,416,737,000
Germany	\$1,726,840,000	United Kingdom	\$2,334,551,000
France	\$1,674,651,000	India	\$2,240,581,000

Sumber: (Michigan State University, 2014b)

1.3. Kondisi Militer

The Turkish Armed Forces atau *Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)* terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang keseluruhan berjumlah 678.617 personel. Data dari nationmaster.com menyebutkan Angkatan Udara Turki yang berjumlah 465 personil menempati peringkat ke-8 dunia. Angkatan militer Turki juga telah dipersenjatai dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih. Angkatan Darat memiliki 3.778 unit tank, 7.550 kendaraan lapis baja (APC) dan kendaraan infanteri (AFVs), dan senjata self-propelled (SPGs) sebanyak 1.013 unit. Sedangkan Angkatan Udara dilengkapi pesawat berjumlah 1.007 unit termasuk helikopter, helikopter tempur, pesawat tempur, pesawat angkut. Angkatan laut dilengkapi dengan sistem frigat, korvet, kapal selam, kapal pertahanan pesisir, kapal perang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 194 unit.

Dengan jumlah angkatan militer yang besar, Turki mampu menggelontorkan anggaran militer sebanyak 2.2% dari total GDP atau setara dengan 18 miliar USD pada 2014. Belanja pertahanan militer Turki di tahun 2013 bahkan mencapai 19 miliar USD dan menempatkan Turki menjadi negara ke-14 dengan belanja pertahanan terbesar, hingga kini (Herdem, 2014). Menurut data dari www.globalfirepower.com anggaran militer Turki tahun 2015 sebesar 18.19 miliar USD dan ada di urutan ke-14 negara dengan anggaran militer terbesar. Dengan melihat jumlah personil dan sistem persenjataan (alutsista), kekuatan militer Turki menempati peringkat sepuluh dunia yang bahkan mengalahkan Israel yang lebih rendah di bawahnya (GFP, 2015).

Keanggotaan Turki dalam NATO sejak tahun 1952 memiliki peran penting bagi pertahanan Barat di wilayah Timur Tengah karena Turki menyumbang jumlah militer terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Turki juga menyediakan wilayah bagi latihan bersama antar anggota NATO dalam program "*Partnership for Peace Training Center*" yang dibentuk sejak tahun 1998 oleh Staf Umum Turki (Republic Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2011). Setelah tragedi Mavi Marmara, Turki memutuskan hubungan

militer dengan Israel termasuk latihan militer gabungan. Turki menarik diri dari latihan angkatan laut dan angkatan udara bersama Israel dan Amerika Serikat dalam operasi '*Reliant Mermaid*' yang diadakan setiap tahun.

Pada tanggal 7 hingga 18 Juni 2010, Turki tidak mengundang Israel untuk latihan militer bersama dalam operasi '*Anatolian Eagle*' di Konya, Turki (WikiLeaks, 2011b). Latihan ini hanya diikuti oleh Amerika Serikat, Yordania, Uni Emirat Arab dan Turki sendiri (WikiLeaks, 2011b). Pada latihan kedua tanggal 5 Oktober 2010, China bergabung dalam operasi '*Anatolian Eagle*'. Turki mendapat banyak penawaran sistem rudal dari China, Perancis, Italia hingga Rusia sehingga Turki tidak harus mengandalkan teknologi senjata dari Israel.

Industri pertahanan militer Turki juga berkembang pesat. Dimana dua dari 100 perusahaan pertahanan terbesar di dunia berada di Turki, yaitu Aselsan dan TUSAS (Hogg & Sezer, 2015). Tahun 2012 ekspor Turki tembus 1.2 miliar USD meningkat 45% dari tahun 2011 (Erdurmaz, 2012). Tahun 2013 meningkat mencapai angka 1.5 miliar USD (Herdem, 2014). Tahun 2014 industri pertahanan Turki ekspor sebanyak 1.6 miliar USD (Ünal, 2015).

Melalui kemampuan militer yang telah diakui internasional ini, pengambilan kebijakan Turki didukung oleh pertimbangan: *pertama*, pemerintah tengah mengandalkan kemampuan perusahaan pertahanan dalam negeri ketimbang membeli dari luar. Hal ini dapat dilihat ketika pemerintah Turki membatalkan pembelian rudal China dan mengalihkan anggaran untuk membangun teknologi sendiri. *Kedua*, ketika diharuskan untuk membeli persenjataan, Turki memiliki berbagai pilihan negara yang menawarkan sistem pertahanan canggih.

2. Faktor Eksternal

A. Konteks Internasional

Politik luar negeri Turki dengan *‘Zero Problem with Neighbors’* mengiring Turki menjadi pemain aktif di kawasan Timur Tengah. Menjadi bagian dari OKI mendorong Turki untuk lebih mengedepankan solidaritas Islam daripada berkawan dengan Israel. Turki banyak berperan dalam mengkoordinir negara-negara anggota OKI untuk aktif terlibat dalam isu Palestina. Pasca tragedi Mavi Marmara, Turki semakin gencar mengkampanyekan kemerdekaan Palestina di berbagai forum PBB (Xinhua, 2011).

Diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI di Jakarta pada tanggal 6-7 Maret 2016 untuk mendukung Palestina sebagai negara berdaulat telah mendorong negara anggota termasuk Turki untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang membuat Turki tetap menekan Israel supaya bersedia meninggalkan blokade Jalur Gaza. Selain itu, dukungan OKI agar Turki menjaga jarak dengan Israel sudah ditunjukkan sejak saat Turki masih bersababat karib dengan Israel. Pada KTT OKI di Iran pada tahun 1997, OKI mengkritik kedekatan Turki dengan Israel terlebih karena kesepakatan Turki melakukan kerjasama strategis dengan Israel (Kosebalaban, 2010).

KESIMPULAN

Meringkas dari sejumlah informasi yang telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya normalisasi hubungan antara Turki dan Israel setelah tragedi Mavi Marmara berjalan lambat karena pengambilan kebijakan luar negeri Turki dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal, diantaranya situasi politik domestik, kondisi ekonomi dan kondisi militer Turki serta faktor eksternal yang mencangkup kedudukan negara dalam konteks internasional

Situasi politik dapat dilihat dari dominasi AKP dalam pemerintahan sejak bahkan sebelum Mavi Marmara mengeluarkan kebijakan yang cenderung kurang kooperatif dengan Israel, terutama figur Recep Tayyeb Erdogan yang paling menentang keras blokade Israel di Jalur Gaza serta kedekatannya dengan petinggi Hamas dan kegemarannya mengkritik operasi militer Israel di Palestina yang kemudian menimbulkan munculnya tuduhan anti-Semit. Munculnya demonstrasi

masyarakat Turki menuntut pertanggungjawaban Israel atas tragedi Mavi Marmara dan serentetan unjuk rasa mengecam serangan Israel ke Palestina sepanjang tahun 2012 hingga 2014 menjadi motivasi bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang semakin agresif terhadap Isarel.

Stabilitas ekonomi Turki selama lima tahun terakhir mendorong Turki untuk mengambil kebijakan politik luar negeri tanpa takut berdampak bagi perekonomian Turki yang tidak bergantung kepada Israel. Pengambilan kebijakan politik luar negeri Turki juga dipengaruhi oleh kekuatan militer dan pertahanan Turki yang telah mumpuni dan menempati peringkat ke-10 negara dengan militer terkuat dunia. Upaya Turki mewujudkan kemerdekaan Palestina mengundang simpati dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk turut menekan Israel menghentikan penindasan di tanah Palestina. Dengan demikian mendorong kebijakan Turki yang konfrontatif terhadap israel.

REFERENSI

- Akser, M., & Hawks, B. B. (2012). Media and Democracy in Turkey: Toward a Model of Neoliberal Media Autocracy. *Middle East Journal of Culture and Communication* 5, 3002.
- Aljazeera. (2011b, 9 14). *Erdogan slams Israel on start of Arab tour*. Retrieved 3 15, 2016, from Aljazeera: <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/09/2011912221636537643.html>
- Berelovich, E. (2014, 11 1). *Turkish-Israeli military relations and security cooperation*. Retrieved 1 18, 2016, from Turkish Review: http://www.turkishreview.org/reports/turkish-israeli-military-relations-and-security-cooperation_541031
- Bulut, U. (2016, 3 17). *"Muslim Jerusalem": Turkey's Message of "Peace" to Israel*. Retrieved 3 23, 2016, from Gatestone Institute: <http://www.gatestoneinstitute.org/7625/turkey-muslim-jerusalem>
- Cagaptay, S. (2010). The AKP's Hamas Policy: Transformation of Turk Foreign Policy and the Turk view of the West. *The FAO Journal*, 1.
- Champion, M., & Mitnick, J. (2011, 9 6). *Israel-Turkish Rupture Deepens*. Retrieved 3 2, 2016, from The United Jerusalem Foundation: <http://www.unitedjerusalem.org/index2.asp?id=1468458&Date=9/6/2011>
- Corke, S., finkel, A., Kramer, D. J., Robbins, C. A., & Schenkkan, N. (2014). *Democracy in Crisis: Corruption, Media, and Power in Turkey*. New York: Freedom House.
- Dombey, D. (2014, 7 22). *Erdogan slams Israel as Gaza Conflict Ends Ddiplomatic Thaw*. Retrieved 3 22, 2016, from Arab-Israeli Conflict:

- <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/2be8ee72-10fd-11e4-b116-00144feabdc0.html#axzz43oenf9wH>
- Dzakirin, A. (2012). *Kebangkitan Pos-Islamisme: Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu*. Solo: Era Adi Citra Media.
- Erdurmaz, A. S. (2012). Analyses Turkish-Israeli Cooperation in the Context of Turkey's "Zero Problem" Foreign Policy. *Journal of Game Theory*, 55-56.
- GFP. (2015, 10 17). *Countries Ranked by Military Strength*. Retrieved 10 25, 2015, from Global Fire Power: www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
- Haaretz. (2010, 10 30). *Turkey Policy Paper: Israel's Actions Threaten Mideast*. Retrieved 2 29, 2016, from Haaretz: <http://www.haaretz.com/israel-news/turkey-policy-paper-israel-s-actions-threaten-mideast-1.321960>
- Handayani, A. P. (2012). Kebijakan Turki Memutuskan Kerjasama Militer Dengan Israel Tahun 2010. *Jurnal Transnasional*, 9.
- Herdem, S. (2014, 9 9). *Turkey: Turkish Defense Industry: A Step Towards A Nation-Oriented Production*. Retrieved 3 22, 2016, from Mondaq: <http://www.mondaq.com/turkey/x/338820/Terrorism+Homeland+Security+Defence/Turkish+Defense+Industry+A+Step+Towards+A+NationOriented+Production>
- Ho, S. (2014, 11 3). *Overwhelming majority of Turks dislike Israel, poll shows*. Dipetik 3 25, 2016, dari The Times of Israel: <http://www.timesofisrael.com/overwhelming-majority-of-turks-dislike-israel-poll-shows/>
- Idiz, S. (2015, 12 24). *Are Mutual Feelings of Isolation Pushing Turkey, Israel Closer?* Retrieved 3 10, 2016, from Al Monitor: <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/turkey-israel-regional-developments-forced-improvement.html>
- ISPAT. (2014). *The Manufacturing Industry in Turkey*. Istanbul: Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency.
- Kalin, I. (2013, 3 25). *After Israel's Apology*. Retrieved 3 12, 2016, from Project Syndicate: <https://www.project-syndicate.org/commentary/resetting-turkish-israeli-relations-by-ibrahim-kalin>
- Kosebalaban, H. (2010). The Crisis in Turkish-Israeli Relations: What is its Strategic Significance? *Journal Essay Middle East Policy Council Volume XVII*, 14.
- Kushner, D. (2010). Before and Beyond the "Freedom Flotilla": Understanding Turkish - Israeli Relations. *Israel Journal of Foreign Affairs IV : 3*, 26-28.
- Lazaroff, T. (2011, 5 13). *Erdogan: ' Hamas is Not a Terrorist Organization*. Retrieved 3 10, 2016, from Jerusalem Post: <http://www.jpost.com/Middle-East/Erdogan-Hamas-is-not-a-terrorist-organization>
- Michigan State University. (2014). *Turkey: Trade Statistics*. Retrieved 2016, from Global EDGE: <http://globaledge.msu.edu/countries/turkey/tradestats>
- Michigan State University. (2014b). *Israel: Trade Statistics*. Retrieved 2016, from Global EDGE: <http://globaledge.msu.edu/countries/israel/tradestats>
- Republic Turkey Ministry of Foreign Affairs. (2011). *Turkey's Relations with NATO*. Retrieved 3 21, 2016, from Republic Turkey Ministry of Foreign Affairs: <http://www.mfa.gov.tr/nato.en.mfa>

- Reuters. (2015, 1 14). *Lieberman Calls Turkey's Erdogan 'anti-Semitic Bully'*. Retrieved 3 22, 2016, from Hareetz: <http://www.haaretz.com/israel-news/1.637090>
- RT. (2016, 3 21). *'No future' for tourism? Israel calls on citizens to avoid visiting Turkey after Istanbul attack*. Retrieved 3 22, 2016, from Question More: <https://www.rt.com/news/336446-turkey-tourism-hotels-sale/>
- Sasley, B. (1998). *A Structural Reinterpretation of Power In The Middle East Explanations And Implications of The Evolving Military Relationship Between Turkey And Israel*. Ottawa: National Library of Canada.
- Sekulow, J. A. (2015). Turkey-Israel Relations. *Journal of the Oxford Centre for the Study of Law & Public Policy*, 13.
- Stern, M., & Ross, D. (2013, 7 31). *The Role of Syria In Israeli-Turkish Relation*. Retrieved 11 2, 2015, from Washington Institute: <https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Ross20130731-GeorgetownJournal.pdf>
- The Economist. (2016, 2 6). *Erdoganomics: Turkey is performing well below its potential*. Retrieved 3 25, 2016, from <http://www.economist.com/news/special-report/21689874-turkey-performing-well-below-its-potential-erdoganomics>
- The Media Line. (2015, 2 5). *Turkish film 'Mastermind' purports to reveal Jewish conspiracy*. Retrieved 3 20, 2016, from Jewish World: <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4652817,00.html>
- Ünal, A. (2015, 11 15). *Turkey cancels \$3.4B missile deal with China to launch own project*. Retrieved 3 22, 2016, from Daily Sabah Diplomacy: <http://www.dailysabah.com/diplomacy/2015/11/15/turkey-cancels-34b-missile-deal-with-china-to-launch-own-project>
- Utami, N. L. (2012). The Impact of Mavi Marmara Incident Towards Turk Israel Diplomatic Relation. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1.
- Uzer, U. (2013). Turkish-Israeli Relations: Their Rise and Fall. *Journal Middle East Policy Council Volume XX, Number 1*, 4.
- WikiLeaks. (2011, 9 6). *9.6.11 Israel Country Brief*. Retrieved 3 2, 2016, from WikiLeaks: https://wikileaks.org/gifiles/docs/40/4088623_9-6-11-israel-country-brief-.html
- WikiLeaks. (2011b). *Anatolian Eagle*. Retrieved 3 3, 2016, from https://wikileaks.org/gifiles/attach/132/132586_lena%20eagle.docx
- World Public Opinion. (2010, 4 18). *Global Views of United States Improve While Other Countries Decline*. Dipetik 3 25, 2016, dari BBC World Service: http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pipa/pdf/apr10/BBCViews_Apr10_rpt.pdf
- Xinhua. (2011, 9 7). *Turkey, Israel relationship faces further deterioration*. Retrieved 3 1, 2016, from China.org.cn: http://china.org.cn/world/2011-09/07/content_23368856.htm